

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Sejarah Perusahaan / Instansi

2.1.1 Profil Instansi

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Instansi ini berada di bawah Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta pelayanan komunikasi publik di wilayah Kabupaten Bangkalan. Diskominfo menjadi salah satu ujung tombak dalam mewujudkan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-Government), transparan, efisien, dan terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Peran ini menjadi semakin penting di tengah tuntutan era digital, di mana kecepatan informasi, keterbukaan data, serta efisiensi layanan publik menjadi indikator kinerja pemerintahan yang baik.

Sebagai instansi teknis yang memiliki kewenangan langsung dalam hal tata kelola informasi, Diskominfo Bangkalan menjalankan berbagai fungsi yang meliputi pengelolaan komunikasi publik, pengembangan infrastruktur TIK, layanan informasi berbasis digital, serta perlindungan dan pengamanan data. Salah satu fokus utama dari Diskominfo adalah memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan media sosial resmi, portal berita pemerintah daerah, layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pengembangan aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan. Dalam konteks ini, Diskominfo tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Selain sebagai penyedia informasi, Diskominfo Kabupaten Bangkalan juga aktif dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini meliputi pembangunan jaringan internet di wilayah-wilayah terpencil, penyediaan WiFi gratis di fasilitas publik, pemeliharaan server dan jaringan pemerintahan, serta integrasi antar aplikasi layanan pemerintahan. Peran ini sangat vital dalam mendukung konektivitas antarlembaga,

serta mempercepat proses birokrasi pemerintahan yang selama ini dinilai kurang efisien. Keberhasilan pengembangan TIK oleh Diskominfo juga menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan program Smart City, di mana berbagai layanan publik dapat terhubung dan dikelola melalui platform digital yang terpusat dan mudah diakses masyarakat.

Diskominfo juga turut serta dalam penguatan literasi digital masyarakat dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar, dan sosialisasi terkait pemanfaatan teknologi informasi secara bijak dan produktif. Melalui kegiatan ini, Diskominfo tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterampilan digital di era modern. Program-program ini ditujukan baik kepada kalangan pelajar, mahasiswa, aparatur sipil negara (ASN), hingga pelaku usaha mikro dan menengah (UMKM). Harapannya, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah dari penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, Diskominfo Kabupaten Bangkalan juga terus berupaya meningkatkan sistem layanan publik berbasis digital melalui pembangunan website layanan, aplikasi pengaduan masyarakat, serta sistem informasi pelayanan seperti Mall Pelayanan Publik (MPP). Sistem ini dirancang untuk menyatukan berbagai jenis layanan ke dalam satu platform yang terintegrasi dan mudah diakses, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke banyak instansi untuk mengurus dokumen atau mencari informasi layanan. Website interaktif MPP yang sedang dirancang dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini merupakan bagian dari inisiatif tersebut. Melalui pengembangan sistem informasi digital yang efisien dan responsif, Diskominfo berharap dapat mendorong partisipasi publik, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta membangun budaya pelayanan yang modern dan adaptif.

Dengan komitmen tinggi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, keterbukaan informasi, dan pelayanan publik yang prima, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan terus melakukan inovasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat terwujudnya masyarakat informatif dan pemerintahan digital yang profesional. Peran yang diemban oleh instansi ini sangat relevan dengan kebutuhan era digitalisasi saat ini dan menjadi ruang pembelajaran penting bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan keilmuan teknologi informasi secara nyata di lingkungan kerja pemerintahan.

2.1.2 Visi Misi

Pada Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Kabupaten Bangkalan, memiliki visi dan misi, antara lain Visinya adalah “Terwujudnya Tata Kelola Komunikasi Dan Informatika Menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Publik”. Visi tersebut mencerminkan tekad Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Efektivitas dan efisiensi merupakan dua unsur utama yang ditekankan, di mana instansi tidak hanya berupaya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga terus mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mendukung keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam berbagai layanan pemerintahan. Visi ini juga menandai komitmen Diskominfo dalam menjadikan teknologi sebagai penggerak transformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang lebih baik dan profesional. Selain itu untuk mewujudkan visi tersebut, Diskominfo Kabupaten Bangkalan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Misi ini menekankan pentingnya pengembangan kapasitas aparatur sipil negara melalui pelatihan, pendampingan, serta penguasaan teknologi terkini agar mampu mengelola sistem informasi pemerintahan dengan baik dan profesional.
2. Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Penguatan jaringan internet, sistem server pemerintah, pengadaan perangkat keras dan lunak yang memadai menjadi bagian dari misi ini, sehingga layanan digital yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan secara lancar, cepat, dan aman.
3. Meningkatkan tata kelola sistem informasi untuk mendukung pelayanan publik yang optimal. Dengan mengembangkan berbagai aplikasi pelayanan, sistem informasi internal, dan website interaktif, Diskominfo mendorong terciptanya ekosistem layanan yang terintegrasi dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi maupun mengurus administrasi secara digital.

Ketiga misi tersebut tidak hanya menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas harian, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam pelaksanaan program-program kerja jangka panjang yang berorientasi pada transformasi digital pemerintahan di Kabupaten Bangkalan. Misi ini juga selaras dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh

mahasiswa, terutama dalam hal pengembangan sistem layanan publik berbasis web yang informatif dan interaktif.

2.1.3 Logo Instansi



Gambar 2.1 Logo Diskominfo Kabupaten Bangkalan

Pada gambar 2.1 merupakan gambar logo dari Diskominfo Kabupaten Bangkalan. Logo instansi tersebut merupakan simbol visual yang mencerminkan identitas, nilai, serta visi dan misi dari suatu lembaga. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan menggunakan dua unsur utama dalam representasi visualnya, yaitu logo Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan logo Diskominfo secara nasional. Kedua logo tersebut secara konsisten digunakan dalam berbagai dokumen resmi, website, aplikasi layanan, hingga papan nama institusi sebagai bagian dari branding dan standarisasi citra organisasi publik.

Logo Pemerintah Kabupaten Bangkalan umumnya digunakan di sisi kiri atas dokumen resmi, menggambarkan identitas daerah sebagai entitas administratif tempat instansi berada. Lambang ini mencerminkan karakteristik budaya, sejarah, serta semangat pelayanan publik yang berakar dari nilai-nilai lokal. Sementara itu, logo Diskominfo (nasional) umumnya ditampilkan di sisi kanan atas dan digunakan sebagai penanda bidang atau sektor kerja instansi dalam ruang lingkup komunikasi dan informatika yang bernaung di bawah struktur pemerintahan nasional.

Secara umum, penggunaan logo ini bertujuan untuk menegaskan posisi Diskominfo sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah yang profesional dan siap mendukung digitalisasi layanan publik. Kombinasi visual ini juga memperkuat identitas organisasi dalam berbagai kanal komunikasi seperti website resmi, aplikasi, laporan tahunan, surat-menyurat, dan dokumen teknis lain yang dikeluarkan oleh instansi. Dalam konteks pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), logo ini turut digunakan sebagai bagian dari dokumentasi dan

pengakuan formal terhadap kegiatan mahasiswa yang dilaksanakan di bawah naungan instansi bersangkutan.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bangkalan dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas secara efisien, profesional, dan terarah dalam pengelolaan bidang komunikasi dan teknologi informasi. Struktur ini dibentuk berdasarkan prinsip pembagian kerja yang proporsional dan koordinatif, dengan mempertimbangkan kompleksitas tugas pokok serta fungsi pelayanan publik berbasis digital yang dijalankan oleh instansi ini.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Diskominfo Kabupaten Bangkalan

Pada gambar 2,2 merupakan gambar terkait struktur organisasi Diskominfo Kabupaten Bangkalan. Pada posisi teratas organisasi adalah Kepala Dinas, saat ini dijabat oleh Zainal ALim, SH., MM yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas perencanaan, pengambilan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Diskominfo. Kepala Dinas berperan sebagai pimpinan strategis yang mengarahkan program-program agar selaras dengan visi misi pemerintah daerah, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan digital dan pelayanan publik yang terintegrasi serta transparan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, yaitu Yuyun Fajar Novela, S.Sos., M.M., yang bertugas mengoordinasikan kegiatan administratif dan operasional, serta menjadi penghubung antara Kepala Dinas dengan setiap unit kerja atau bidang. Sekretariat ini memiliki dua subbagian, yakni:

1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian, dijabat oleh Eny Yuliana, SH, yang bertugas mengelola urusan kepegawaian, administrasi umum, arsip, serta urusan rumah tangga kantor. Fungsi ini sangat penting dalam memastikan kelancaran operasional instansi.
2. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, dijabat oleh Yuli Windiya Rini, S.Sos, yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran, penyusunan rencana kegiatan tahunan, serta pelaporan keuangan dan evaluasi kinerja.

Selain itu, terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga profesional dengan keahlian teknis tertentu seperti analis data, programmer, desainer sistem informasi, dan teknisi jaringan. Kelompok ini bekerja lintas bidang dan berperan mendukung pelaksanaan tugas teknis sesuai dengan kebutuhan kegiatan harian maupun program jangka panjang Diskominfo.

a. Bidang Sumber Daya TIK dan Statistik

Dipimpin oleh Ir. Mohammad Zainal Arif, M.Si, bidang ini memiliki tugas utama dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta penyusunan dan pemeliharaan basis data statistik yang mendukung kebijakan pemerintah daerah. Bidang ini terbagi dalam tiga subkoordinator, yaitu:

- SubKoor Sumber Daya TIK (Nur Agustinah, ST): fokus pada peningkatan kapasitas infrastruktur perangkat keras dan lunak, serta pengelolaan sumber daya TIK di lingkungan pemerintah daerah.
- SubKoor Ekosistem TIK (Dani Kusuma Cipta, SH): bertugas menjaga ekosistem digital yang kondusif dan mendukung pengembangan inovasi teknologi, baik internal pemerintahan maupun kolaborasi dengan pihak eksternal.
- SubKoor Data dan Statistik (Ach. Syaifuddin, S.Sos): menangani pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik daerah sebagai bahan analisis dan perencanaan pembangunan.

b. Bidang Aplikasi Informatika

Dikepalai oleh Anang Afandi, S.Kom, bidang ini bertanggung jawab atas pengembangan dan integrasi aplikasi pemerintahan yang mendukung e-Government. Bidang ini memainkan peran penting dalam pengembangan sistem layanan publik seperti aplikasi pengaduan, informasi layanan, dan sistem internal berbasis web. Terdapat tiga subkoordinator utama:

- SubKoor Keamanan Informasi dan Persandian (Subari, SE): fokus pada pengamanan informasi pemerintah serta pengelolaan sistem persandian dan perlindungan data.
- SubKoor Infrastruktur Jaringan TIK (Rahmad, SE): bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengembangan jaringan komputer serta server-server utama milik pemerintah daerah.
- SubKoor Pengembangan E-Government (Andrias Satria Pradana, S.AP): memfokuskan diri pada pembuatan aplikasi layanan pemerintahan yang efisien, terintegrasi, dan user-friendly.

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Dipimpin oleh Huzaimah, SE., MM yang dimana bidang ini menangani komunikasi publik, media sosial pemerintah, serta distribusi informasi resmi kepada masyarakat. Fungsi bidang ini sangat penting dalam membangun citra positif pemerintah serta menjamin keterbukaan informasi kepada publik. Subkoordinator bidang ini meliputi:

- SubKoor Pengelolaan Informasi Publik (Yuda Saputra, SE): bertanggung jawab atas kelengkapan informasi layanan publik dan pengelolaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
- SubKoor Pengelolaan Komunikasi Publik (Yogi Setiawan, SE, M.Si): menangani strategi komunikasi melalui berbagai kanal media agar pesan pemerintah tersampaikan secara efektif.
- SubKoor Pengelolaan Media Komunikasi (Sahriyah, S.Sos): mengatur penyampaian informasi melalui media cetak, elektronik, dan digital, termasuk pengelolaan konten media sosial resmi instansi.

Struktur organisasi ini memungkinkan Diskominfo Bangkalan untuk bekerja secara sinergis dan berorientasi hasil. Masing-masing bidang dan subbidang saling terhubung dalam mekanisme koordinasi yang terstruktur dan diarahkan untuk mendukung efisiensi layanan,

pengelolaan informasi publik, serta percepatan digitalisasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Dengan pembagian peran yang terperinci dan berbasis kompetensi, Diskominfo mampu menjalankan berbagai program unggulan yang berdampak langsung pada masyarakat, sekaligus membuka ruang kolaboratif yang luas bagi pelaksanaan kegiatan PKL berbasis proyek pengembangan sistem informasi seperti yang dilakukan oleh mahasiswa.

2.3 Bidang Usaha

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika. Tugas ini dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip transparansi, efisiensi, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di era digital saat ini. Secara umum, bidang tugas dan layanan Diskominfo mencakup aspek teknis dan strategis dalam pengelolaan informasi publik, pengembangan teknologi, serta pelayanan komunikasi kepada masyarakat.

Salah satu tugas utama Diskominfo adalah menyelenggarakan dan mengelola komunikasi publik, baik melalui media konvensional seperti radio, media cetak, maupun platform digital seperti website resmi dan media sosial. Komunikasi publik ini bertujuan untuk menyampaikan kebijakan pemerintah, mengedukasi masyarakat, serta membangun opini publik yang positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, Diskominfo juga melakukan pembinaan terhadap humas instansi pemerintah lainnya agar tercipta keselarasan dalam strategi komunikasi daerah.

Di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Diskominfo bertugas merancang, membangun, dan memelihara infrastruktur teknologi yang digunakan oleh pemerintah daerah. Hal ini meliputi penyediaan jaringan internet bagi kantor-kantor pemerintahan, pembangunan server pusat data, penyediaan email resmi ASN, serta pengamanan jaringan dan sistem informasi dari potensi ancaman digital. Diskominfo juga menangani layanan teknis seperti pengelolaan domain pemerintah (go.id), pemeliharaan website OPD, dan sistem digitalisasi internal.

Selanjutnya, Diskominfo juga memberikan layanan dalam bentuk pengembangan aplikasi dan sistem informasi berbasis web, yang digunakan oleh masyarakat maupun internal pemerintahan. Salah satu contohnya adalah pengembangan website Mall Pelayanan Publik (MPP) yang menjadi fokus kegiatan PKL ini. Sistem tersebut dikembangkan agar masyarakat

dapat mengakses informasi layanan secara cepat dan efisien tanpa harus datang langsung ke lokasi fisik pelayanan. Selain itu, Diskominfo juga menangani sistem PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), sistem pengaduan online, dan portal berita resmi pemerintah daerah.

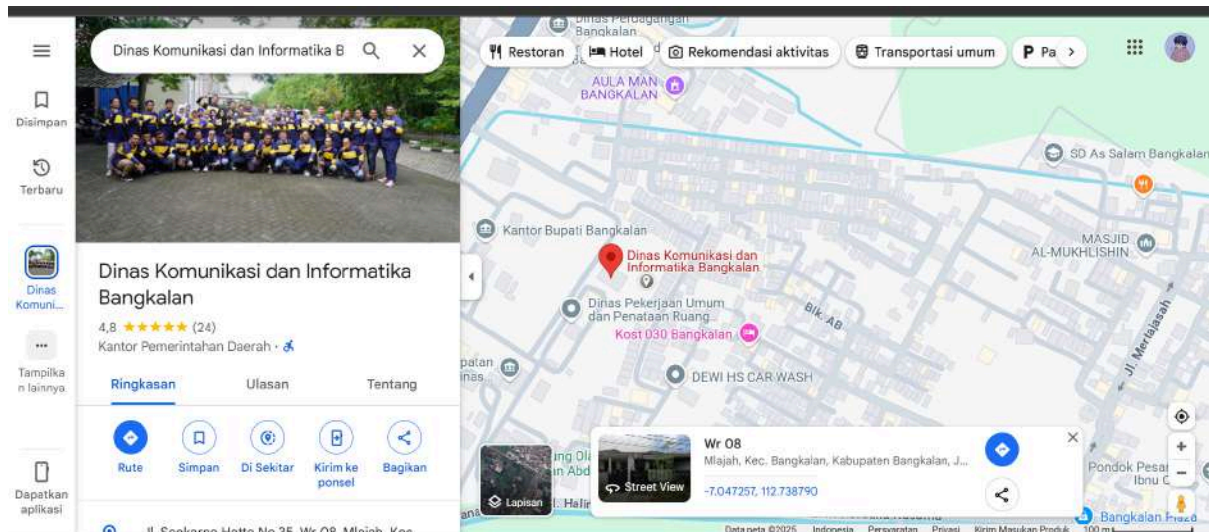
Tugas lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan data dan statistik sektoral, yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan daerah. Diskominfo bertanggung jawab atas validitas, keterpaduan, serta publikasi data terbuka (open data) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, akademisi, dan sektor swasta.

Dalam bidang persandian dan keamanan informasi, Diskominfo juga melakukan pengelolaan sistem pengamanan informasi digital pemerintah daerah, seperti tanda tangan elektronik, enkripsi data, dan penyusunan kebijakan perlindungan data sensitif. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dalam sistem pemerintahan elektronik.

Tak hanya melayani instansi pemerintah, Diskominfo juga menyelenggarakan program literasi digital bagi masyarakat umum. Kegiatan ini berupa pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi secara produktif dan bijak. Program literasi ini sangat penting dalam rangka mengurangi kesenjangan digital dan mendorong inklusi teknologi hingga ke lapisan masyarakat paling dasar.

Dengan cakupan tugas yang luas dan terus berkembang, Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan memainkan peran sentral dalam membentuk wajah pemerintahan digital di tingkat daerah. Berbagai layanan yang dikembangkan oleh instansi ini tidak hanya memperkuat sistem birokrasi, tetapi juga menjadi jembatan utama antara pemerintah dan masyarakat dalam era informasi yang serba cepat dan transparan.

2.4 Lokasi Instansi



Gambar 2.3 Lokasi Diskominfo Kabupaten Bangkalan

Pada gambar 2.3 merupakan gambar terkait lokasi Diskominfo Kabupaten Bangkalan. Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan, yang terletak di Jl. Soekarno - Hatta No. 35, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Kode Pos 69116. Lokasi ini berada di pusat pemerintahan Kabupaten Bangkalan dan termasuk dalam kawasan strategis yang mudah diakses oleh kendaraan umum maupun pribadi. Lingkungan sekitar instansi ini juga dikelilingi oleh berbagai kantor organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, menjadikan lokasi ini sebagai pusat kegiatan administratif dan koordinasi pemerintahan daerah.

Letak kantor Diskominfo Bangkalan yang berada di jalur utama menjadikannya sebagai lokasi yang representatif untuk pelaksanaan kegiatan PKL. Mahasiswa dapat dengan mudah menjangkau tempat ini dari berbagai wilayah di dalam Kabupaten Bangkalan maupun dari luar daerah melalui jalur transportasi darat. Kondisi fisik bangunan kantor cukup representatif dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti ruang kerja pegawai, ruang server, ruang rapat, serta akses internet internal yang stabil, sehingga menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan PKL secara optimal.

2.5 Kegiatan dan Program Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bangkalan memiliki berbagai kegiatan dan program strategis yang berorientasi pada peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital serta penguatan komunikasi publik. Program-program ini disusun sebagai bentuk implementasi dari visi dan misi instansi, yaitu mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika menuju pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pelayanan publik.

Secara umum, kegiatan dan program kerja Diskominfo Bangkalan terbagi dalam beberapa bidang utama, yaitu bidang aplikasi informatika, bidang sumber daya TIK dan statistik, serta bidang informasi dan komunikasi publik. Masing-masing bidang memiliki fokus kegiatan dan sasaran strategis yang saling mendukung dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan daerah.

a. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang ini berperan dalam mengembangkan sistem dan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik (e-Government). Program utama dari bidang ini mencakup:

- Pengembangan Aplikasi Layanan Publik Terpadu, seperti sistem informasi Mall Pelayanan Publik (MPP), aplikasi pengaduan masyarakat, serta portal berita resmi pemerintah daerah.
- Pemeliharaan dan Integrasi Sistem Digital, untuk memastikan seluruh aplikasi yang digunakan antar organisasi perangkat daerah (OPD) dapat saling terhubung dan berjalan stabil.
- Keamanan Informasi dan Persandian, yang bertujuan menjaga kerahasiaan data pemerintahan melalui pengelolaan tanda tangan digital, enkripsi data, serta kebijakan keamanan jaringan.

b. Bidang Sumber Daya TIK dan Statistik

Bidang ini fokus pada penguatan infrastruktur teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Program strategisnya meliputi

- Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet dan Server Pemerintah Daerah, guna mendukung sistem kerja digital lintas instansi.

Penyediaan Akses Wi-Fi Publik dan Internet Gratis di Fasilitas Umum, yang menjadi bagian dari inisiatif Smart City dan pemerataan akses digital di wilayah Kabupaten Bangkalan.

- Pengelolaan Data Statistik dan Open Data, agar masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha dapat mengakses data publik dengan mudah dan transparan untuk berbagai kebutuhan penelitian dan inovasi kebijakan.

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)

Bidang ini berperan penting dalam membangun hubungan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Beberapa kegiatan utamanya antara lain

- Manajemen Komunikasi Publik dan Media Sosial Resmi Pemerintah Daerah, yang bertujuan menyampaikan informasi kebijakan, kegiatan, serta layanan publik secara cepat dan akurat.
- Peningkatan Literasi Digital dan Edukasi Masyarakat, melalui pelatihan, seminar, dan kampanye cerdas bermedia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan teknologi digital secara bijak.
- Pelayanan Informasi Publik melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang memastikan keterbukaan informasi publik berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Selain ketiga bidang tersebut, Diskominfo juga menjalankan program lintas sektor yang bersifat kolaboratif, seperti:

- a. Program Smart City Bangkalan, yang bertujuan mengintegrasikan berbagai sistem layanan publik ke dalam satu platform digital.
- b. Program Transformasi Digital Pemerintahan Desa, yang mendukung digitalisasi administrasi di tingkat kecamatan dan desa.
- c. Program Bangkalan Digital Service (BDS), sebagai inovasi layanan publik berbasis website dan aplikasi untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas interaksi masyarakat dengan pemerintah.

Dalam konteks kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), mahasiswa berkontribusi langsung pada pelaksanaan program prioritas pengembangan website interaktif Mall Pelayanan Publik (MPP), yang merupakan salah satu inisiatif utama Diskominfo dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa tidak hanya menjadi peserta pembelajaran lapangan, tetapi juga berperan aktif dalam implementasi nyata dari strategi transformasi digital pemerintahan daerah.